

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2025

A. Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang Undang tersebut telah memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan tersebut dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Selain itu, munculnya Undang undang Nomor 108 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang sekarang telah diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menti Dalam Negri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terselenggara Good Governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan dan cita cita bangsa. Salah satunya upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara adlah Penyapampaina Laporan pertanggungjawaban yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berterima umum. Hal tersebut diatur dalam undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Daerah yang mensyaratkanb bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan dengan standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran SKPD merupakan Sub Kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran SKPD sebagai bentuk tanggung jawab OPD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran SKPD, dalam implementasinya mencakup beberapa unsur, diantaranya adalah, Unsur Keuangan merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan. Unsur Manajemen merupakan rangkaian kegiatan membandingkanantara target dengan relaisasi dalam bentuk koefisian yang terukur (persentase, jumlah, unit dan lain lain)

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kegiatan dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana kegiatan pengelolaan keuangan daerah meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan. Pelaporan keuangan SKPD adalah laporan pertanggung jawaban SKPD atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Tujuan dari penyusunan Laporan keuangan, untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan. Disamping itu Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pelaporan keuangan SKPD menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan / SKPD yang bersangkutan antara lain :

- a. Sebagai alat pengendali dan pengawasan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Satuan Dinas Kesehatan Kab Pessel
- b. Sebagai alat untuk mengukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan APBD.
- c. Sebagai bahan informasi dalam rangka pengambilan keputusan.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Tersedianya Laporan Bulanan/Triwulan dan Semesteran SKPD dengan Realisasi dan
2. Capaian sesuai dengan aturan keuangan
3. Tersedianya LRA dengan tepat waktu
4. Sasaran nya 20 Puskesmas se kabupaten Pesisir Selatan termasuk 1 RSUD Tapan yang berjumlah sebanyak 44 orang

D. LOKASI

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran SKPD tahun 2025 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah laporan Bulanan Realisasi Anggaran Keuangan 2025

F. JENIS KEGIATAN

Sesuai dengan DPA APBD Kabupaten Pesisir Selatan bahwa jenis /pekerjaan yang dilaksanakan adalah :

1. Rapat- Rapat (Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan)
2. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke BPKAD

G. WAKTU PELAKSANAAN

Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan. Dari bulan Januari sampai Desember 2025 atau sepanjang tahun 2025.

H. PEMBIAYAAN

Biaya tersedia Rp. 104.317.210,- (*Seratus Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah*)

Kuasa Pengguna Anggaran



Jafri Wandu, SKM, M.T
Nip. 19710105 199403 1003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Apt. Silvia Ikhlas, SSI, MARS
Nip. 19770409 200701 2 001